

DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI DALAM PEMILU 2004¹

M. Syahbudin Latief²

Abstract

This paper is about the process of election during democracy periode in Indonesia. The problem that usually accured during the election was the involvement of the elites in the process of election. Some elites, both from the political parties and from the village, usually interfering the process. The case in Gampeng shows that all elements have been working together in successing the process of election. Reflecting from the election process in Gampeng, the transition process towards more democratic government in Indonesia could be happen in peace and harmony if there was honesty inside the political elites. They should more appreciate the voice from the people they were represented, instead of fighting for their own needs.

Keywords: *democracy, election, elites*

Pengantar

Tulisan ini hendak melukiskan prosesi pemberian dan penghitungan suara dalam pemilu legislatif 5 April 2004 yang lalu di Pedukuhan Gampeng, Desa Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gampeng adalah sebuah pedukuhan terpencil di puncak pegunungan Bantul bagian utara. Sebagaimana diketahui, melalui sejumlah perda yang dibuat pada 27 Oktober 2001, Bupati Bantul, Idham Samawi, melakukan pembaruan dalam penataan desa-desa di Bantul. Beberapa di antaranya ialah penyebutan dusun menjadi "pedukuhan", kepala dusun menjadi "dukuh", kepala desa menjadi "lurah", sekretaris desa menjadi "carik", dan perangkat desa menjadi "pamong desa". Selain itu, carik dan kepala bagian dipilih langsung oleh penduduk desa; demikian pula dukuh dipilih

langsung oleh penduduk pedukuhan (Perda Kabupaten Bantul No.22/2001). Sejak awal, penulis sengaja ingin mengamati secara langsung pelaksanaan pemilihan umum dengan desain yang berbeda di sebuah wilayah yang tergolong terpencil di Bantul, Yogyakarta. Pemilu tersebut konon adalah pemilu demokratis ketiga di Indonesia setelah 1955 dan 1999.

Sebelum masuk ke lokasi pemilihan (TPS), telah muncul dugaan dalam benak penulis bahwa tentu akan banyak terjadi manipulasi dan kecurangan dalam prosesi pemberian dan penghitungan suara. Hal ini mengingat masih kuatnya pengaruh elite desa atau pedukuhan sebagai penyelenggara pemilu, yaitu mereka yang duduk di Panitia Pemungutan Suara Desa (PPSD) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di satu sisi.

¹ Tulisan ini semula adalah makalah yang disampaikan dalam Seminar Internasional V "Dinamika Politik Lokal: Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu". Percik, Salatiga, 13 s.d. 17 Juli 2004. Temuan-temuan dan gagasan yang dikembangkan dalam tulisan ini merupakan suatu kajian awal dan bersifat eksploratif sehingga perlu dielaborasi lebih lanjut.

² Staf khusus Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sementara itu, di sisi lain adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup, dan kesadaran politik masyarakat pedukuhan. Namun, yang terjadi di lapangan ternyata jauh berbeda daripada dugaan sebelumnya. Faktor kehadiran saksi dari keenam partai politik (PDI-P, PKS, PAN, PKPB, Partai Golkar, dan PKB), terutama saksi dari PKS, PDI-P, dan PAN yang bersikap kritis dan berani, sangat memengaruhi kualitas perwujudan serta dinamika demokrasi dan transparansi di TPS 23. Selain itu, adanya kontrol dari sebagian masyarakat setempat secara langsung, yaitu sejak saat pemberian suara pada pagi hari hingga usainya penghitungan suara pada tengah malam hari, juga amat memengaruhi kualitas demokrasi dan transparansi di TPS 23 Gampeng.

Tulisan ini akan mendeskripsikan secara singkat karakteristik masyarakat Pedukuhan Gampeng dengan fokus pada karakteristik yang menonjol dari aspek sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya, akan diulas juga situasi TPS 23 dan pembentukan KPPS sebelum memasuki fokus tulisan, yaitu prosesi pemberian suara dan penghitungan suara. Pada prosesi pemberian suara akan dikaji perilaku dan respons para pemilih, KPPS, saksi, dan kelompok warga masyarakat yang mengamati di luar TPS ketika proses pencoblosan surat suara berlangsung. Akan diamati kejadian yang menarik perhatian pihak tertentu atau sebagian kalangan, serta kejadian yang dianggap bukan sesuatu yang "aneh" bagi mereka. Demikian pula pada saat penghitungan suara berlangsung, akan dipelajari sikap dan respons para saksi, KPPS, dan sebagian warga masyarakat yang turut dalam proses penghitungan suara secara langsung. Hasil penghitungan suara di TPS 23 akan didiskusikan pada bagian berikutnya sebelum mengakhiri tulisan ini dengan penutup.

Karakteristik Masyarakat

Pedukuhan Gampeng adalah satu dari 22 pedukuhan yang ada di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Pedukuhan Gampeng ini terletak

di sisi paling utara dari Desa Triwidadi dan sekaligus merupakan perbatasan Kecamatan Pajangan. Jumlah penduduknya per Juni 2004 sekitar 450 jiwa (100 KK), yang terbagi menjadi 4 RT dan jika dihitung dari jumlah rumah penduduk, terdapat 90 rumah. Jumlah balita kurang dari 20 anak, sedangkan jumlah lansia (usia 60 tahun ke atas) ada sekitar 48 orang. Jarak dari pedukuhan ke kantor Balai Desa Triwidadi sekitar 3 km, sedangkan ke jalan raya Yogya-Wates sekitar 6 km. Ongkos ojek dari pedukuhan sampai jalan raya Yogya – Wates antara Rp5.000,00 sampai dengan Rp10.000,00. Aliran listrik dari PLN mulai masuk ke Gampeng pada 1995 awal, tetapi hingga saat ini masih ada sebagian penduduk pedukuhan yang belum menikmati listrik. Fasilitas SD baru dibangun tahun 1978 mengingat sejak 1964, untuk menuju ke SD yang terletak di sekitar pusat desa penduduk harus berjalan kaki sekitar 4 kilometer dan untuk menuju ke SMP yang ada di pusat kota kecamatan harus menempuh jarak 7 kilometer. Pada musim kemarau, keadaan Gampeng sangat kering dan gersang, bahkan lebih parah daripada keadaan di Wonosari (Gunung Kidul). Oleh karena itu, penduduk menganggap keadaan alam daerahnya adalah yang paling parah dibandingkan dengan pedukuhan lain se-Kecamatan Pajangan, bahkan mungkin se-Bantul.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk berhasil menyelesaikan hingga tingkat SMA. Namun, biasanya setelah itu mereka mencari pekerjaan/bekerja (*glidig*) keluar dari desanya. Pada saat ini dari sekitar 450 jiwa penduduk, hanya ada dua warga pedukuhan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi: satu orang sedang menyelesaikan studinya di fakultas pertanian di sebuah PTS dan satu orang lagi baru masuk di sebuah PTN. Kedua warga itu adalah putra seorang tokoh masyarakat di pedukuhan. Selain itu, tercatat ada seorang sarjana lulusan sebuah IKIP swasta yang bekerja sebagai karyawan di sebuah sekolah perawat. Menurut pendapat seorang tokoh masyarakat, sekitar 40 persen

penduduk buta huruf, terutama pada kelompok usia 50 tahun ke atas.

Dilihat dari mata pencarian pokok, 90 persen warga bekerja sebagai buruh, baik di pabrik, pertukangan/bangunan, di pasar (buruh angkut), di perusahaan pengiriman barang, maupun sebagai buruh *polowijo* (hasil pertanian), seperti kuli panjat pohon kelapa. Apabila dibuat daftar, maka urutannya adalah 25 orang bekerja sebagai buruh paket, 15 orang sebagai buruh bangunan, 10 orang sebagai petani kebun (ketela, jagung, dan kedelai), 8 orang sebagai pedagang pasar, 4 orang tukang kayu, dan 3 orang pegawai negeri sipil (seorang guru SD, tukang kebun SD, dan pegawai sebuah sekolah perawat). Sementara itu, sekitar 60 persen penduduk sudah memiliki televisi (3 dari 5 rumah memiliki televisi).

Sebagai perbandingan, penduduk Desa Triwidadi pada umumnya bekerja sebagai petani dan buruh tani karena sebagian besar wilayahnya berupa sawah dan tegalan yang tidak subur. Komoditas pertanian yang ditanam sebagian besar adalah jagung (150 hektar), ketela pohon (111 hektar), padi (62 hektar), kedelai (35 hektar), dan kelapa (25 hektar). Berdasarkan data *Profil dan Potensi Desa Triwidadi* per September 2003, penduduk yang menganggur di setiap pedukuhan di Desa Triwidadi (meliputi 22 pedukuhan) rata-rata berjumlah 22 orang. Adapun jumlah penduduk miskin pada Juni 2003 sebanyak 982 KK (9.661 orang).³ Desa Triwidadi adalah satu dari 3 desa di Kecamatan Pajangan, dengan jumlah penduduk 10.543 jiwa (2.159 KK) pada Juni 2003. Jarak desa ke Kota Yogyakarta adalah 24 km, sedangkan ke pusat kabupaten adalah 12 km.

Sepanjang ingatan Dukuh Gampeng yang menjabat sejak 1976, pemilihan umum yang diselenggarakan di pedukuhannya sejak 1955 hingga 1977 selalu dimenangkan oleh PNI. Namun, sejak 1982 hingga 1997 berganti Golkar-lah yang selalu memenangkan pemilu. Pada pemilu 1999, PDI-P berhasil memperoleh

suara terbanyak, kemudian disusul oleh PAN dan Golkar yang bersaing ketat (Tabel 2). Menanggapi gejala ini, seorang sesepuh pedukuhan berpendapat dahulu "aliran sungai" (suara rakyat) diarahkan ke Golkar, sedangkan sekarang arus sungai dialirkan ke PDI-P mengikuti kehendak bupati (bupati yang sedang menjabat berasal dari PDI-P). Sementara itu, sikap penduduk dalam pemilu pada umumnya mengikuti pendapat para tokoh masyarakat pedukuhan. Apabila dilihat dari segi keormasan, warga pedukuhan yang tercatat aktif sebagai anggota NU dan Muhammadiyah hanya ada dua orang.

Pembentukan KPPS dan Situasi TPS 23

Anggota KPPS diusulkan oleh dukuh kepada lurah, sedangkan pemilihan ketua KPPS merupakan kesepakatan antaranggota KPPS tanpa campur tangan lurah. KPPS berjumlah 7 orang, dibantu oleh 2 orang petugas linmas (perlindungan masyarakat yang dulunya Hansip) sebagai petugas pengamanan TPS (Pam TPS). Sebagian besar warga pedukuhan mengenal dengan baik para anggota KPPS. KPPS di TPS 23 terdiri dari dukuh sebagai ketua, 2 orang PNS (seorang juru kebun di sebuah SD merangkap sebagai *modin* atau *kaum* dan seorang pegawai sekolah perawat), dan 4 orang warga biasa dengan kriteria memiliki pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan dan bersedia berjuang (*gelem nyambut gawe*). Mereka ini sehari-hari bekerja sebagai buruh dan petani, bahkan salah seorang petugas Pam TPS di Gampeng adalah seorang tokoh lokal PDI-P yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu. Ketua KPPS diberi honorarium Rp50.000,00 per bulan, sedang anggota KPPS dibayar sejumlah Rp40.000,00. Atas usulan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ada tambahan honorarium dari KPU per anggota sebesar Rp75.000,00. Ketua dan anggota KPPS dilantik pada akhir Maret 2004, sedangkan kartu pemilih diterima di pedukuhan pada hari H-5.

³ Pada 2003, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul adalah 163.100 orang (20 persen), sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja sebesar 6,63 persen, yang bekerja di sektor pertanian 41,29 persen, dan bekerja bukan di sektor pertanian 52,08 persen (BPS, 2003).

Di Desa Triwidadi terdapat 24 TPS, dengan jumlah pemilih tetap 7.047. Pada setiap TPS terdapat antara 176 sampai maksimal 300 pemilih. Di Pedukuhan Gampeng terdapat dua TPS, yaitu TPS 22 dengan 299 pemilih (101 pemilih adalah warga Gampeng, sedangkan selebihnya adalah penduduk Pedukuhan Guwo dan Sabrang Lor) dan TPS 23 dengan 298 pemilih (150 pemilih adalah warga Gampeng, sedangkan sisanya penduduk Pedukuhan Blabak). TPS 22 diketuai oleh Dukuh Gampeng dan menampung penduduk dari beberapa pedukuhan, yaitu Gampeng, Guwo, dan Sabrang. Adapun di TPS 23 dipimpin oleh Dukuh Nanggul dan menampung pemilih dari Gampeng dan Blabak. Jadi, di setiap TPS ada pemilih dari pedukuhan lain. Hal ini terjadi karena pembagian TPS tidak didasarkan pada unit administrasi/ birokrasi pemerintahan, tetapi berdasarkan daftar blok Sensus Penduduk 2000.

Area TPS 23 yang seluas sekitar 6x10 meter persegi menempati halaman samping rumah seorang penduduk yang bekerja sebagai tukang batu dan kayu, yang kebetulan juga sedang memperbaiki rumahnya. Keadaan TPS 23 serba sangat sederhana. Sebagai penutup dari terik matahari digunakan terpal yang di sana-sini berlubang-lubang kecil dan ujung-ujungnya diikatkan ke pohon dan rumah, sedangkan bagian tengah disangga dengan sebuah bambu. Di sisi utara TPS berjejer 4 bilik suara menghadap ke selatan yang diberi sekat seng bekas pada bagian belakang, samping, dan antarbilik. Satu bilik yang berada di ujung timur adalah bilik yang selalu dihindari oleh para pemilih karena tidak tertutup terpal sehingga pada siang hari menjadi sangat panas. Ketua dan anggota KPPS duduk di sisi selatan, sejajar dengan para saksi dan pemantau. Di bagian barat berjejer 4 kotak suara dengan tutup dibuka penuh diletakkan berurutan dari utara ke selatan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Di sisi timur terdapat dua baris kursi besi bercat biru muda berjumlah 16 buah, tempat para pemilih duduk menunggu panggilan dan antri untuk mencoblos. Kursi-kursi ini pada pagi hari masih tersusun rapi, namun semakin siang posisinya menjadi kacau.

Kursi-kursi dan meja untuk tempat duduk 4 anggota KPPS memimpin prosesi pemberian suara, tempat tinta, dan meja untuk para saksi dipinjam dari rumah warga. Adapun kursi besi untuk tempat para pemilih menunggu panggilan KPPS dan giliran mencoblos, untuk para saksi, untuk petugas keamanan/Linmas, untuk tempat petugas menunggu di samping 4 kotak suara dan meja pendaftaran, adalah kursi sewaan. Area TPS 23 dikelilingi oleh pagar bambu yang dibelah, dengan dua pintu masuk dan keluar bagi pemilih di sebelah timur dan barat, sedangkan di sebelah utara dan selatan dibatasi oleh tembok rumah penduduk.

Prosesi Pemberian Suara

Menurut penuturan kepala dukuh, sebelum hari-H pencoblosan telah dilakukan sosialisasi pemilu legislatif sebanyak 3 kali, yaitu diselenggarakan oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara Desa Triwidadi) dan KKN UGM. Prosesi pemberian suara diawali dengan pembacaan sumpah/janji ketua dan anggota KPPS kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan/penghitungan jumlah dan penandatanganan surat suara oleh ketua KPPS. Ada kesepakatan di antara KPPS, petugas Linmas, saksi, dan masyarakat bahwa bilik suara dilebarkan untuk memudahkan pembeberan surat suara dan pencoblosan agar proses pemungutan suara berlangsung cepat. Selain itu, tutup kotak suara juga dibuka penuh karena warga pada umumnya kesulitan memasukkan surat suara melalui celah kotak suara yang sempit di samping untuk menghindari rusaknya surat suara. Jika harus memperlebar celah kotak suara, KPPS dan saksi tidak setuju karena bisa dianggap merusak peralatan pemilu. Kesulitan lain yang dialami warga Pedukuhan Gampeng adalah ketika melipat kembali surat suara pada umumnya tidak rapi, bahkan tidak sedikit yang melakukannya dengan kacau. Oleh karena itu, di dekat kotak suara ada seorang anggota KPPS yang siap membantu warga untuk melipat surat suara dengan rapi (*men mlepes*) dan sekaligus memasukkan ke tiap-tiap kotak suara. Tentang pembagian tugas ini, seorang saksi

berkomentar agar para anggota KPPS tidak menganggur (... *ndak ora nyambut gawe*).

Prosedur pemberian suara diawali dengan cara warga menyerahkan "kartu pemilih" dan "surat undangan pemberian suara" ke bagian pendaftaran, yang selanjutnya akan diteruskan ke ketua KPPS. Ketua KPPS akan memanggil para pemilih satu per satu yang akan memperoleh sekaligus kartu pemilih (kartu biru) dan "surat suara". Pembagian tugas di antara ketua dan anggota KPPS ialah 2 petugas pendaftaran (salah satunya dari petugas linmas), ketua dan 2 anggota KPPS memimpin proses pemberian suara, 1 petugas menyalurkan pemilih ke bilik suara, 1 petugas penjaga kotak suara, 1 petugas pencelup jari ke tinta, dan 1 petugas penjaga keamanan (Pam TPS dari linmas).

Pada saat pencoblosan surat suara, kerap terjadi dalam satu bilik dimasuki oleh dua orang. Misal, seorang ibu ditemani oleh anaknya karena sang ibu buta huruf atau seorang lansia yang buta huruf ditemani oleh cucunya. Ada juga seorang kakak beradik (si adik berusia 65 tahun) masuk dalam satu bilik suara karena sang kakak buta huruf. Seorang ibu muda yang tengah memberi ASI kepada bayinya kebingungan ketika dipanggil oleh petugas KPPS untuk segera mencoblos. Melihat gelagat seperti ini, baik KPPS maupun saksi sama-sama menyarankan si ibu membawa serta bayinya masuk ke dalam bilik suara. Hal-hal seperti itu merupakan sesuatu yang biasa bagi KPPS, warga pedukuhan, dan saksi. Saksi juga menoleransi praktik/cara mencoblos seperti itu dengan alasan daripada surat suara rusak.

Namun, saksi kerap kali juga memperingatkan petugas KPPS. Misal ketika seorang pemilih tidak boleh masuk ke bilik suara berdua meski yang satu adalah temannya, mengingatkan jangan lupa mencelupkan jari di tinta ketika akan meninggalkan area TPS, atau menghimbau pemilih segera masuk ke bilik suara yang telah kosong. Beberapa saksi rajin menanyakan jumlah surat suara yang telah dicoblos atau menanyakan sisanya kepada petugas KPPS. Yang sering terjadi adalah saksi

memberi komentar-komentar umum (misalnya jangan lupa surat suara dibuka secara komplit) atau dengan kata-kata bersayap kepada beberapa pemilih yang dikenalnya dengan baik (misalnya memperingatkan berhati-hati jangan salah mencoblos) saat seorang pemilih menuju ke bilik suara. Dalam keadaan antrian panjang, ada sekitar 15 orang duduk menunggu di kursi tunggu, sementara 25-30 orang lainnya menunggu di luar TPS sambil duduk di bawah pohon atau duduk menggerombol di rerumputan dekat parkir sepeda motor agak jauh dari area TPS 23. Hingga pukul 11 jumlah surat suara yang dicoblos sudah mencapai setengah lebih. Jika diambil rata-ratanya, waktu yang diperlukan oleh setiap pemilih untuk menyelesaikan pencoblosan 4 surat suara di bilik suara adalah antara 4 sampai 6 menit. Seorang guru SD yang dianggap berpendidikan cukup baik menghabiskan waktu sekitar 4 menit.

Sekitar 1 jam sebelum batas akhir pemberian suara, dua orang tua yang sedang sakit didatangi oleh petugas KPPS dengan ditemani seorang saksi dari partai Golkar untuk melakukan pencoblosan di tempat kediaman masing-masing. Sepuluh menit menjelang batas waktu pendaftaran (pukul 13.00) masih ada 40 pemilih yang belum hadir. Akhirnya tepat pukul 13.00 siang pendaftaran dan prosesi pemberian suara dinyatakan ditutup. Setelah dihitung, dari 298 pemilih terdaftar baru 258 orang yang hadir memberikan suaranya. Dengan demikian, ada 40 warga pedukuhan (13 persen) yang sudah tercatat sebagai pemilih, tetapi tidak datang memberikan suaranya di TPS 23. Menurut ketua dan anggota KPPS, warga pedukuhan yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya ini pada umumnya adalah penduduk jompo, sedang bepergian, atau telah meninggal dunia.

Menurut pendapat seorang pamong desa, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada pagi hari sebelum prosesi pencoblosan dilakukan, ada sebuah parpol yang melakukan "serangan fajar", yaitu memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 sampai Rp20.000,00 kepada sejumlah penduduk. Parpol yang lain mengirim enam drum aspal ke Pedukuhan

Gampeng dan kebetulan dikumpulkan di depan lokasi TPS 23, sekitar satu minggu sebelum hari H pencoblosan. Aspal itu direncanakan untuk mengaspal jalan utama pedukuhan, yang beberapa tahun sebelumnya prosesnya telah dibantu oleh tokoh/pejabat yang sama berupa pembangunan jalan semen untuk sepeda motor.

Penghitungan Suara dan Hasil

Setelah istirahat salat dan makan siang, prosesi penghitungan suara dimulai. Penghitungan suara dilakukan oleh 7 anggota KPPS ditambah 2 petugas Linmas. Situasi dan pembagian tugas di antara anggota KPPS pada saat penghitungan suara dapat digambarkan sebagai berikut. Yang dihitung pertama adalah surat suara DPR pusat dan dimulai pada pukul 14.00. Mula-mula dua petugas Linmas membuka kotak suara dan menumpahkan isinya di atas meja. Selanjutnya, seorang petugas KPPS membuka surat suara sambil menyeleksi apakah ada surat suara yang salah masuk ke kotak DPR pusat. Dua petugas membentangkan surat suara, sedangkan seorang petugas yang lain membaca nama partai politik dan nama caleg yang dicoblos oleh warga. Satu orang menuliskan/mencatat parpol dan nama caleg pilihan penduduk pada lembar catatan perhitungan suara, sedang satu orang lagi membantu membukakan lembar catatan perhitungan suara. Surat suara yang telah dibaca dan dicatat dilipat kembali oleh seorang petugas KPPS dan selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam kotak suara. Adapun surat-surat suara yang batal atau tidak sah dikumpulkan secara terpisah. Tugas-tugas penghitungan suara dilakukan secara bergantian di antara kesembilan anggota KPPS, diselingi dengan istirahat secara bergilir pula. Istirahat penuh dilakukan secara bersama-sama oleh anggota KPPS hanya pada waktu makan siang. Namun, tugas pembacaan surat suara selalu dilakukan hanya oleh 3 anggota KPPS tertentu (termasuk ketuanya).

Para saksi mengamati dengan serius setiap detil proses penghitungan surat suara. Mereka duduk berhadapan dengan jarak relatif dekat dengan para petugas KPPS yang sedang

melakukan penghitungan suara. Di bagian depan, duduk secara berurutan wakil dari PDIP, PKPB, PAN, dan PKS, sedangkan di belakangnya adalah saksi dari Partai Golkar dan PKB. Di kiri dan kanan saksi dari PDI-P dan PKS duduk 5 orang rekan partai yang mendampingi. Sementara itu, beberapa kawan saksi dari tiap-tiap parpol lainnya datang dan pergi silih berganti. Akomodasi (transportasi dan konsumsi) para saksi ditanggung oleh tiap-tiap parpol. Keenam saksi mengikuti prosesi penghitungan suara secara lengkap dari awal pencoblosan hingga akhir penghitungan suara. Di bagian belakang, sekelompok ibu-ibu, anak-anak, dan remaja turut meramaikan suasana penghitungan. Para saksi kerap kali menginterupsi proses penghitungan karena menganggap cara kerja petugas KPPS terlalu cepat, kadang kala juga kurang teliti sehingga beberapa kali terjadi surat suara yang seharusnya sah dianggap tidak sah. Petugas KPPS merespons sikap para saksi dengan cara mendekatkan surat suara kepada para saksi dan menanyakan keputusan saksi terhadap coblosan di surat suara yang dinilai meragukan. Terhadap kasus-kasus seperti ini, saksi sering juga maju ke depan untuk memeriksa surat suara secara langsung. Dalam hal memberikan alasan sebuah surat suara sah atau tidak sah, saksi dari PKS adalah yang paling fasih berargumentasi. Pada saat suara untuk PDI-P semakin meninggalkan parpol lainnya, setiap ada tambahan suara baru selalu disambut dengan teriakan gembira oleh warga yang berada di luar arena TPS 23. Penghitungan surat suara untuk DPR selesai sekitar pukul 16.00.

Penghitungan suara berikutnya adalah untuk DPD. Prosesnya sama dengan ketika menghitung suara DPR pusat, namun dapat berlangsung lebih cepat karena format surat suaranya lebih sederhana. Hal yang menarik adalah mendengar komentar-komentar petugas KPPS, saksi, dan warga ketika seorang calon anggota DPD memperoleh dukungan suara secara berturut-turut (misalnya GKR Hemas) yang mereka sebut dengan *panen*. Sebaliknya, mereka merasa kasihan terhadap calon-calon anggota DPD yang sama sekali tidak

memperoleh dukungan suara. Terhadap figur GKR Hemas, para petugas KPPS, saksi, dan juga warga pedukuhan yang ikut menyaksikan proses perhitungan suara berkomentar *nderek sultan* karena GKR Hemas adalah istri Sultan Hameng Buwono X, Gubernur D.I. Yogyakarta. Banyak nama calon anggota DPD yang sama sekali tidak dikenal oleh penduduk Pedukuhan Gampeng. Di akhir perhitungan, tampak di beberapa meja tergeletak kalender meja bergambar foto salah seorang calon anggota DPD, yang kebetulan justru tidak mendapatkan dukungan di TPS 23.

Setelah penghitungan suara untuk DPD selesai, diteruskan dengan penghitungan surat suara untuk caleg DPRD provinsi. Proses penghitungan suara caleg DPRD provinsi berjalan relatif sama dengan DPR pusat, namun lebih rumit karena surat suaranya berjumlah dua lembar secara terpisah. Oleh karena itu, pada akhir penghitungan terjadi sedikit kekacauan karena adanya surat suara yang terpisah-pisah dan sulit disatukan. Setelah diperiksa kembali, ternyata ada 7 surat suara yang lembarannya kacau dan akhirnya dianggap tidak sah, sedangkan yang tidak sah karena salah dalam teknis pencoblosan ada 65 surat suara sehingga jumlah surat suara gugur adalah 72. Namun, sesudah dilakukan penghitungan dengan teliti, total surat suara tidak sah untuk DPRD provinsi adalah 74 buah. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah suara yang berhasil dikumpulkan oleh parpol peraih suara tertinggi (72 suara untuk PDI-P, lihat Tabel 1). Terhadap kejadian ini, setidaknya tiga orang saksi dari PDIP, PKS, dan PKB berkomentar petugas KPPS secara asal saja memasukkan kartu ke dalam kotak ... (*waton plang-plung, angger kothak dileboni ...*).

Terakhir adalah penghitungan suara untuk DPRD kabupaten yang dimulai sekitar pukul 22.00 WIB. Karena hari telah larut malam, maka dipasanglah satu lampu neon 20 watt untuk menerangi surat suara yang akan dibaca. Setelah diseleksi, ternyata ada 5 surat suara DPRD provinsi yang masuk ke kotak suara DPRD kabupaten. Selama proses penghitungan berjalan, para saksi kerap

memprotes cara kerja KPPS yang dianggap kurang adil ataupun kurang cermat. Misalnya jangan terlalu cepat membaca surat suaranya atau yang membaca surat suara satu orang saja. Sebenarnya komentar dari saksi yang bernada seperti ini juga kerap dilontarkan pada saat penghitungan suara untuk DPR pusat dan provinsi. Selain itu, warga pedukuhan yang ikut menyaksikan proses penghitungan sering pula melontarkan komentar-komentar bernada sindiran atas cara kerja KPPS yang sepiintas kadang terasa menyakitkan. Namun ternyata hal itu justru menciptakan suasana menjadi lebih segar dan santai karena petugas KPPS yang disindir menjawabnya dengan nada canda pula. Misalnya, ketua KPPS yang berkacamata dan sudah cukup tua itu dikomentari oleh warga "*wis tuwo, wis njaluk ganti koko motone ...*" dan ia menjawabnya "*cen lagi golek duwit dienggo tuku sing anyar je*" Sementara itu, di ruang tengah dari rumah yang sedang diperbaiki, seorang anggota KPPS sibuk mengerjakan pencatatan administrasi penghitungan sebagai bahan laporan ke kelurahan (PPS) yang harus diserahkan malam itu juga. Selama proses perhitungan suara berlangsung, di bagian belakang terdapat sekitar 5 warga pedukuhan yang turut mengamati proses penghitungan suara sambil santai tidur-tiduran. Di pinggir arena TPS 23 ada sekitar 6 orang yang berselimutkan sarung ikut mengamati proses perhitungan suara dengan tekun. Sekitar 6 meter dari pusat kegiatan penghitungan suara, di bagian belakang di luar arena TPS 23, ada sekitar 5 orang penduduk tampak turut mengamati pula proses penghitungan suara sambil bercengkrama di rerumputan. Di dekat mereka ini terdapat sekitar 10 sepeda motor yang diparkir. Prosesi penghitungan suara diakhiri dengan penandatanganan setumpuk berita acara oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi, kira-kira pada pukul 01.30 dini hari.

Hasil Penghitungan Suara

Hasil penghitungan suara untuk DPR pusat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten di TPS 23 disajikan dalam Tabel 1. Adapun hasil perhitungan suara untuk calon anggota DPD di

TPS 23 Pedukuhan Gampeng, Desa Triwidadi, dan Kecamatan Pajangan disajikan dalam Tabel 3.

Diskusi Temuan Lapangan

Dari perbandingan perolehan suara di antara kelima parpol yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif 5 April 2004 (Tabel 1), tampak pilihan rakyat kepada PDI-P adalah konsisten, baik di tingkat pedukuhan (di TPS 23), tingkat desa, maupun tingkat kecamatan. PDI-P selalu menempati urutan pertama dalam perolehan suara, baik pada tingkat pedukuhan, desa, maupun kecamatan; begitu pula untuk pemilihan caleg DPR pusat, DPRD provinsi, maupun caleg DPRD kabupaten. Jika temuan ini kita bandingkan dengan hasil pemilu 1999 (Tabel 2), maka tampak kecenderungan itu tetap konsisten, baik pada tingkat pedukuhan maupun desa; serta untuk pemilihan caleg pusat, provinsi, dan kabupaten.

Di TPS 23, yang menarik adalah perolehan suara PKS menempati urutan kedua setelah PDI-P, kemudian disusul oleh PKPB, PPP, dan Partai Golkar. Partai Patriot Pancasila mencuri angka pada urutan ke-4 untuk pemilihan caleg DPRD provinsi, dan PAN pada urutan ke-5 untuk pemilihan caleg DPRD kabupaten.

Keberhasilan PKS meraih suara terbanyak di urutan kedua di TPS 23, baik untuk pemilihan caleg DPR pusat, provinsi, maupun kabupaten antara lain karena PKS dengan serius telah menggarap massa di daerah terpencil ini sejak 1999 (dengan mendirikan pengurus ranting partai). Selain itu, kader-kader PKS pada umumnya adalah anak-anak muda yang energik, militan, dan sangat loyal pada pimpinan partainya. Menurut pendapat seorang kader PKS di Gampeng, satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Bantul yang pernah berkunjung ke Pedukuhan Gampeng adalah anggota legislatif dari PKS.

Perolehan suara PKPB di peringkat ke-3 di TPS 23, baik untuk caleg DPR pusat, provinsi, maupun kabupaten, antara lain, disebabkan oleh dekatnya letak Desa Triwidadi dengan rumah tempat tinggal Pak Wito (adik Jend. Purn. Soeharto, mantan Presiden RI) di Desa Argomulyo, Kec. Sedayu. Letak Desa Argomulyo berada di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Pedukuhan Gampeng. Sementara itu, anak Pak Wito yang bernama Aryo Winoto yang adalah keponakan Soeharto merupakan caleg nomor satu dari PKPB untuk DPRD kabupaten.

Tabel 1
Perbandingan Hasil Perolehan Suara Lima Besar Parpol dalam Pemilu 5 April 2004 di TPS 23 Pedukuhan Gampeng, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul

TPS 23 (Pedukuhan Gampeng) (Jumlah Pemilih Terdaftar: 298)			Desa Triwidadi (Jumlah Pemilih Terdaftar: 7038)			Kecamatan Pajangan (Jumlah Pemilih Terdaftar: -)		
DPR Pusat	DPRD Provinsi	DPRD Kab	DPR Pusat	DPRD Provinsi	DPRD Kab	DPR Pusat	DPRD Provinsi	DPRD Kab/
89 PDI-P	72 PDI-P	101 PDI-P	2.163 PDI-P	1.997 PDI-P	2.236 PDI-P	5.778 PDI-P	4.693 PDI-P	5.820 PDI-P
52 PKS	49 PKS	54 PKS	892 PKPB	777 PKPB	1.002 PKPB	3.548 PKB	3.048 PKB	3.442 PKB
41 PKPB	30 PKPB	46 PKPB	575 PPP	517 PKB	642 PPP	2.536 PKPB	2.032 PKPB	2.999 PKPB
14 PPP	8 P Patriot Pancasila	12 PPP	536 PAN	489 PAN	511 PAN	1.953 PAN	1.837 PAN	1.920 PAN
10 P Golkar	7 P Golkar	6 PAN	518 PKB	442 PPP	511 PKB	1.097 P Golkar	781 P Golkar	1.159 PPP
24 suara tdk sah	74 suara tdk sah	15 suara tdk sah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari data primer (catatan pemantauan) di TPS 23, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul (form Lampiran Model DA-1).

Tabel 2
Perbandingan Hasil Perolehan Suara Lima Besar Parpol dalam Pemilu 1999
di TPS I Pedukuhan Gampeng dan Desa Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul

TPS I (Pedukuhan Gampeng) (Jumlah Pemilih: 369 orang)			Desa Triwidadi (Jumlah Pemilih: 5671 orang)		
DPR	DPRD I	DPRD II	DPR	DPRD I	DPRD II
124 PDI-P	119 PDI-P	125 PDI-P	1.578 PDI-P	1.587 PDI-P	1.591 PDI-P
54 PAN	68 Golkar	58 PAN	812 PKB	817 PKB	797 PKB
53 Golkar	56 PAN	56 Golkar	729 Golkar	745 Golkar	719 Golkar
27 PKB	22 PKB	21 PKB	592 PPP	592 PPP	615 PPP
18 PPP	19 PNI Front Marhaenis	21 PPP	392 PAN	381 PAN	387 PAN

Sumber: diolah dari Rekapitulasi Rincian Hasil Penghitungan Suara, Formulir Model D4 Komputer PPS, Desa Triwidadi, Kec. Pajangan, Kab. Bantul.

Tabel 3
Hasil Perolehan Suara Lima Besar Calon Anggota DPD dalam Pemilu 5 April 2004
di TPS 23 Pedukuhan Gampeng, Desa Triwidadi, dan Kecamatan Pajangan

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Anggota DPD		
TPS 23 Pedukuhan Gampeng	Desa Triwidadi	Kec. Pajangan
GKR. Hemas (110)	GKR. Hemas (2.450)	GKR. Hemas (7.052)
H. Margono (28)	H. M. Jaril (702)	H. M. Jaril (1.738)
H. M. Jaril (22)	Benyamin S, SH (339)	Drs.H.A. Hafidh A, MM (1.392)
H.M. Busro M, SH, MM (13)	H. Ali Warsito (301)	Hj. Evi Sofia I (760)
Hj. Evi Sofia I (9)	Hj. Evi Sofia I (283)	Benyamin S, SH (666)

Sumber: Diolah dari data primer (catatan pemantauan) di TPS 23, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul (form Lampiran Model DA-1).

Kecilnya perolehan suara PAN dan PKB di TPS 23 dapat diartikan ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah dan NU, kurang berperan dan tidak memengaruhi pilihan masyarakat pada pemilu legislatif. Selain itu, tampaknya baik kader PAN maupun PKB kurang bekerja sungguh-sungguh menggarap massa di wilayah perdesaan terpencil, seperti Pedukuhan Gampeng. Fenomena TPS 23 juga dapat dibaca sebagai bukti masih kuatnya dominasi PDI-P di wilayah Bantul, bahkan hingga ke pelosok desa.

Perolehan suara GKR Hemas sebagai calon anggota DPD dari D.I. Yogyakarta yang nyaris mutlak dan konsisten baik pada tingkat TPS 23,

desa, maupun kecamatan (Tabel 3) menunjukkan figurinya sangat dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat di Yogya. Namun, kenyataan ini jelas didukung oleh realitas lainnya, yaitu posisi kultural dan strukturalnya sebagai permaisuri Sultan HB X – pemangku tahta Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekaligus juga menjabat sebagai Gubernur D.I. Yogyakarta.

Perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional daftar calon tertutup (pemilu 1999) menjadi sistem proporsional daftar calon terbuka (pemilu legislatif 5 April 2004) agaknya masih membingungkan masyarakat, terutama di perdesaan. Dari hasil pemantauan

penghitungan suara di TPS 23 tampak perolehan suara “caleg isi” dari parpol pemenang pemilu selalu lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara “caleg kosong”. Caleg isi adalah caleg dari suatu parpol yang namanya dicoblos bersama-sama dengan simbol parpol. Caleg kosong adalah suatu istilah untuk menunjukkan pemilih yang hanya mencoblos simbol parpol, tetapi tidak mencoblos nama caleg (di lapangan, pada saat penghitungan suara, para petugas KPPS biasa menyebutnya sebagai suara untuk “caleg kosong”). Dari Tabel 4 terlihat di tingkat TPS 23, perolehan suara caleg isi baik untuk DPR pusat maupun DPRD provinsi dari PDI-P berada di bawah perolehan suara caleg kosong. Untuk DPR pusat, caleg isi memperoleh 35 suara, sedangkan caleg kosong memperoleh 54 suara. Demikian halnya untuk DPRD provinsi, perbandingannya adalah 32 suara untuk caleg isi dan 40 suara untuk caleg kosong. Pola yang sama juga terjadi pada tingkat desa, baik pada parpol pemenang pemilu (PDI-P) maupun parpol urutan kedua (PKPB).

Gejala di atas dapat dibaca bahwa penduduk pedukuhan dan desa cenderung lebih mengenal simbol dan nama partai politik ketimbang nama-nama calegnya. Parpol yang sudah dikenal oleh

masyarakat luas tampaknya kurang berusaha keras untuk mempromosikan para calegnya. Sebaliknya, beberapa parpol yang relatif baru dan bukan pemenang pemilu menunjukkan tanda-tanda keberhasilan memperkenalkan calegnya kepada masyarakat pedukuhan dan desa. Di tingkat TPS 23 misalnya, perolehan suara caleg isi (32) dari PKS untuk DPRD provinsi hampir dua kali lipat suara caleg kosong (17). Demikian juga halnya yang terjadi pada Partai Patriot Pancasila untuk DPRD provinsi dan PAN untuk DPRD provinsi pada tingkat desa (Tabel 4). Temuan ini dapat diartikan tidak sepenuhnya benar jika dikatakan masyarakat kecil (*wong cilik*) seperti yang hidup di Pedukuhan Gampeng dan Desa Triwidadi mengalami kesulitan mencoblos gambar parpol dan nama caleg dalam pemilu 2004. Namun, jika dikatakan perubahan sistem pemilu 2004 mengakibatkan kebingungan bagi masyarakat luas, itu adalah benar.

Kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi dalam pencoblosan surat suara yang mengakibatkan tidak sahnya suara adalah sebagai berikut. Untuk DPR pusat hanya mencoblos nama caleg saja, surat suara telah berlubang (cacat, tanpa diketahui oleh pemilih),

Tabel 4
Perbandingan Perolehan Suara antara “Caleg Kosong” dengan “Caleg Isi”
di TPS 23 Pedukuhan Gampeng dan di Desa Triwidadi, untuk Pemilihan Caleg DPR Pusat
dan DPRD Provinsi pada Pemilu Legislatif 5 April 2004

Perolehan Suara di TPS 23 Pedukuhan Gampeng				Perolehan Suara di Desa Triwidadi			
“Caleg Kosong”		“Caleg Isi”		“Caleg Kosong”		“Caleg Isi”	
DPR Pusat	DPRD Provinsi	DPR Pusat	DPRD Provinsi	DPR Pusat	DPRD Provinsi	DPR Pusat	DPRD Provinsi
PDI-P 54	PDI-P 40	PDI-P 35	PDI-P 32	PDI-P 1.408	PDI-P 1.083	PDI-P 755	PDI-P 914
PKS 22	PKS 17	PKS 30	PKS 32	PKPB 562	PKPB 401	PKPB 330	PKPB 376
PKPB 19	PKPB 12	PKPB 22	PKPB 18	PPP 265	PKB 224	PPP 310	PKB 293
PPP 7	P Patriot Pancasila 1	PPP 7	P Patriot Pancasila 7	PAN 219	PAN 165	PAN 317	PAN 324
P Golkar 5	P Golkar 4	P Golkar 5	P Golkar 3	PKB 245	PPP 180	PKB 273	PPP 262

Sumber: Diolah dari data primer (catatan pemantauan) di TPS 23, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Pajangan, Kab. Bantul (form Lampiran Model DA-1).

coblosan silang, coblosan di 3 atau 4 tempat, dan "halus" (sama sekali tidak dicoblos). Untuk DPRD provinsi, yang banyak terjadi adalah dua lembar surat suara dicoblos sekaligus tanpa dipisahkan sehingga tembus ke gambar parpol di sebaliknya (*coblos wutuhan*), coblosan di luar kotak, coblosan antara parpol dan caleg berbeda (caleg yang dicoblos dari parpol lain), dan mencoblos 2 caleg.

Tampaknya konfigurasi politik pada tingkat lokal, sebagaimana tampak dari hasil pemilu 5 April 2004 di TPS 23 Pedukuhan Gampeng, Desa Triwidadi, dan Kecamatan Pajangan tidak sama dan sebangun dengan yang terjadi pada tingkat nasional. Jika pada tingkat nasional Partai Golkar adalah pemenang pemilu 5 April 2004, maka pada tingkat lokal pemenangnya tetap adalah PDIP, sama persis dengan hasil Pemilu 1999 (lihat Tabel 1 dan Tabel 2). Pada tingkat lokal, posisi Partai Golkar justru berada pada urutan ke-5, baik di tingkat pedukuhan maupun kecamatan. Di tingkat desa, Golkar justru tidak masuk 5 besar. Agaknya ramalan Bill Liddle bahwa 70 persen rakyat tidak ingin melihat Megawati memimpin negeri ini tidak terbukti, setidaknya untuk kasus di Pedukuhan Gampeng, Desa Triwidadi, dan Kecamatan Pajangan, Bantul.⁴ Namun, Liddle benar ketika mengungkapkan PKS akan memperoleh peningkatan persentase perolehan suara yang signifikan dalam pemilu 2004. Salah satu penjelasannya ialah karena PKS partai kader.

Penutup

Ada dua prinsip pokok yang mendasari dirumuskannya UU No.12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No.23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Pertama*, pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat.⁵ *Kedua*, pemilu

"harus" diselenggarakan secara demokratis dan menggalang partisipasi rakyat seluas-luasnya. Mengamati drama politik prosesi pencoblosan suara dan penghitungan suara di TPS 23 Pedukuhan Gampeng, dapatlah dikatakan apa yang menjadi misi kedua undang-undang di atas relatif telah terwujud. Proses pemberian dan penghitungan suara di TPS 23 berlangsung dalam suasana yang sangat transparan, jujur, partisipatif, dan terbuka ruang yang luas untuk bertukar pikiran di antara petugas KPPS, saksi, dan warga masyarakat.

Salah satu masalah dalam pelaksanaan pemilu 2004 yang dipandang berpotensi memicu pecahnya konflik ialah proses penghitungan suara yang tidak transparan atau tidak akurat (Sparringa, 2004). Oleh karena itu, sebagian masyarakat bersikap skeptis akan hasilnya dan dampaknya pada proses transisi demokrasi. Menurut Sparringa (2004), antusiasme rakyat pada pemilu legislatif relatif rendah. Sinyalemen Sparringa tersebut ternyata tidak terbukti dalam kasus di TPS 23. Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2004 di TPS 23 berlangsung cukup tinggi. Proses penghitungan suara dilakukan dengan terbuka, adil, dan demokratis. Pengawasan penghitungan suara dilakukan dengan cermat, adil, jujur, bersungguh-sungguh, dan antusiasme yang tinggi oleh para saksi yang mewakili keenam parpol serta warga masyarakat pedukuhan. Perselisihan yang muncul dalam proses penghitungan suara dan perbedaan pendapat dalam menilai keabsahan surat suara dapat diselesaikan. Semua pihak bersedia bertukar pikiran secara jujur dan terbuka, toleransi, dan sikap saling menghormati dan menghargai di antara petugas KPPS dan para saksi serta warga masyarakat yang terlibat langsung dalam proses penghitungan suara.

⁴ Liddle memprediksi karier politik Megawati akan merosot pascapemilu 2004, antara lain karena buruknya komunikasi politik. Oleh karena itu, 70 persen rakyat tidak akan memilih lagi Megawati pada pemilu presiden 5 Juli 2004. Moncong putih tidak akan membawa hasil yang signifikan. Sebaliknya, 60 persen rakyat tampaknya justru menyukai Orde Baru karena ia membawa kemakmuran. Pada pemilu 2004 publik akan menghukum PDIP. Namun, turunnya pamor PDIP tidak serta-merta membuka keuntungan politik bagi partai-partai baru karena publik kecewa dengan proses reformasi. Yang mengambil keuntungan justru adalah Golkar, kata Liddle, karena Golkar adalah satu dari tiga partai lama yang sudah dikenal oleh rakyat (perbincangan *Metro TV* dengan R. Wiliam Liddle pada 1 April 2004, tentang apakah akan terjadi perubahan peta politik di Indonesia pascapemilu 2004).

⁵ Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia (Budiardjo, 1985).

Berkaca dari pengalaman pemilu 2004 di TPS 23 Pedukuhan Gampeng, menurut hemat penulis, proses transisi menuju pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia akan berlangsung dengan damai dan lancar jika ada kesediaan dari elite politik dari berbagai tingkat kekuasaan untuk jujur, menghargai suara rakyat kecil, dan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Tidak semata-mata memenangkan kepentingan diri dan kelompoknya atas nama kepentingan rakyat. Hambatan proses transisi menuju demokrasi, kalau mau jujur, sebenarnya ada pada kaum elite di masyarakat (para *penggede*), bukan pada rakyat biasa (*wong cilik*).

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. 2002. *Bantul Dalam Angka 2001*. Bantul.
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003. Buku 2: Kabupaten*. Jakarta: Subdir Analisis Statistik Lintas Sektoral.
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. 2003. *Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001 dan 2002*.
- Budiardjo, Miriam. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 44-45.
- Daftar Panduan Survei Profil dan Potensi Desa, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, September 2003*.
- Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Nomor: 03/PPS/01/2004 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Dalam Pemilihan Umum 2004(ditetapkan di Triwidadi, 12 Maret 2004).
- Lembaga Informasi Nasional(www.lin.go.id). Seputar Pemilu 2004. Leaflet.
- Sparringa, D. 2004. "Pemilu 2004: taksonomi tema dan isu relevan," dalam M. Faried C dan Lambang T(ed.), *Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan*. Yogyakarta: CSPS UGM dan FES Indonesia.
- Subekti, Valina Singka. 2003. *Sosialisasi Pemilu 2004*. <http://www.kpu.go.id>, 09/12/03.
- Tim Litbang Kompas. 2002. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya Dalam Satu Naskah. Diolah oleh Redaksi Kompas Dari Naskah UUD 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat. *Kompas*, 12 Agustus 2002.
- Undang-Undang RI No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta
- Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jakarta